

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan 3, Jakarta: Sinar Grafika
- Agus Dwiyanto (editor), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Ketiga, Mei 2008
- AP. Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Bachtiar Effendi, SH. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni, 1993
- Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Efendi Perangin-angin, 1994, *Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sudjito, 1987, *Prona*, Liberty, Yogyakarta
- Urip Santoso, 2013, *Hukum Agraria*, Jakarta Kencana
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta Kencana

Skripsi dan Jurnal

Henny Saida Flora, *PRONA Sebagai Usaha Mempercepat Pensertifikatan Tanah dan Menciptakan Tata Tertib Pertanahan*, Jurnal Hukum Pro Justitia

Aryo Danu Kusumo, Hj.Endang Sri Santi, Triyono, *Proyek Operasi Nasional Agraria Sebagai Upaya Tertib Hukum Pertanahan (Studi Di Desa Kesugihan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)*, Undip

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).